

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Hasbi Rifqiansyah

Muhammad Saifi

Devi Farah Azizah

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

E-mail: Hasbirif@gmail.com

ABSTRACT

The goals of study is to determining the effectiveness and contribution of active tax billing actions which includes the warning letter, forced letter, and seizure letter to disbursement of tax arrears in Tax Office Pratama North Malang during 2011-2013. The type of research used in this study is a descriptive study with approach case study. Data collected through interviews and documentation. The results of the study indicate that the effectiveness of tax billing rate is still not effective and the contribution of active tax billing actions to disbursement of tax arrears is still lacking. The factors is a lack of public awareness, taxpayer compliance in paying his tax debt and less optimal active tax collection process.

Keyword : *Tax Debt, , Taxpayer compliance, Warning Letter, Forced Letter, Seizure Letter*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan secara keseluruhan pajak masih sangat kurang. Faktor penyebab hal tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya serta kurang optimalnya proses penagihan pajak aktif.

Kata kunci : *Utang Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan*

PENDAHULUAN

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Suandy, 2011:2). Dari berbagai sumber-sumber penerimaan negara, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penopang terbesar terhadap jumlah total pendapatan negara. Menyadari pentingnya pajak sebagai sumber terbesar pada penerimaan negara, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya

mengoptimalkan sektor perpajakan. Saat ini, diketahui sedikit sekali Wajib Pajak (WP) yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dari puluhan juta orang Indonesia yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya sekitar 8,5 juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitupun dengan badan usaha, dari belasan juta yang terdaftar, hanya sekitar 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajak (pajak.go.id).

Sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia menuntut wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutangnya, sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, dalam ajaran materiil pada sistem *self assessment* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan (*tatbestand*) yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak tersebut selain sebagai sarana administrasi dalam pelaksanaan penagihan pajak, juga sebagai dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Penagihan Pajak dibedakan menjadi dua, yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. penagihan pasif ialah ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan jatuh tempo yaitu selama 30 hari. Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif dimana pada penagihan aktif fiskus berperan aktif dalam proses penagihan.

Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan surat teguran dilakukan dimana STP, SKPKB, SKPKBT belum juga dilunasi hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mencakup dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru yang mana merupakan wilayah padat penduduk dan padat perkantoran dengan mobilitas kegiatan ekonomi yang tinggi sehingga mempunyai potensi untuk menggali penerimaan pajak, serta memungkinkan terdapatnya wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Malang Utara terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai. Berikut data pencairan Tunggakan Pajak yang terjadi pada tahun 2011-2013 di KPP Pratama Malang Utara.

Tabel 1 Jumlah Tunggakan dan Pencairan Tunggakan di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2011-2013

Tahun	Tunggakan dan Pencairan	Surat Teguran (Rp)	Surat Paksa (Rp)	SPMP (Rp)
2011	Tunggakan	1.887.568.420	505.818.186	40.158.080
	Pencairan	596.112.613	468.448.892	332.452.180
2012	Tunggakan	901.942.443	1.052.927.762	663.212.215
	Pencairan	596.436.795	642.845.724	402.874.516
2013	Tunggakan	9.782.084.117	1.128.936.317	96.832.782
	Pencairan	119.449.414	342.362.531	92.106.884

Sumber : Seksi penagihan KPP Pratama Malang Utara, 2014.

Berdasarkan data pada tabel 1, menunjukkan bahwa jumlah pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif yang terdiri atas surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) di KPP Pratama Malang Utara tahun 2011-2013 berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Malang Utara belum berjalan secara efektif dan perlu diketahui penyebabnya. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan perbaikan kinerja pada KPP Pratama Malang Utara khususnya pada bagian penagihan pajak untuk dapat mengoptimalkan tindakan penagihan pajak aktif sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap jumlah total penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahannya sebagai berikut : Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak ? dan Berapa tingkat kontribusi

penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak total ?

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak dan mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak total.

KAJIAN PUSTAKA

Utang Pajak

Pengertian Utang Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 8 No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, bahwa “Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Suandy (2008:128) menyatakan bahwa pada umumnya utang pajak timbul karena undang-undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada wajib pajak. Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu, hak dan kewajiban negara dan rakyat juga tidak sama.

Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Urutan tindakan penagihan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Bab IV tentang Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Fiskus menerbitkan Surat Teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- b. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah ditegur, penagihan akan dilanjutkan dengan

penerbitan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran.

- c. Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, tindakan penagihan dilanjutkan dengan penyitaan dalam waktu 2x24 jam.
- d. Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, dilaksanakan Pengumuman Lelang dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyitaan.
- e. Apabila setelah lewat 14 hari utang pajak tidak dilunasi juga, dilakukan penjualan barang sitaan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN).

Efektivitas

Ulum (2008:199) mengemukakan bahwa pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan menurut Taliziduhu (2005:163) efektivitas khusus bagi pemerintahan didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Lebih lanjut Ndraha menyatakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan mencapai tujuan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

Efektivitas penagihan pajak =

$$\frac{\text{Realisasi pencairan tunggakan pajak}}{\text{Target pencairan tunggakan pajak}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan melihat indikator sebagai berikut :

- Sangat efektif : Lebih dari 100%
Efektif : 90 % - 100 %
Cukup efektif : 80 % - 90 %
Kurang efektif : 60 % - 80 %
Tidak efektif : Kurang dari 60 %. (Nurlan, 2006:49)

Penagihan pajak aktif dapat dikatakan sangat efektif apabila persentase yang dicapai melebihi 100% atau realisasi melebihi target yang telah ditetapkan.

Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama (Guritno, 1992:76). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:752) kontribusi dapat diartikan sebagai sebagai sumbang. Maka, dalam kaitannya dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak yang terdiri atas surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap jumlah total penerimaan pajak.

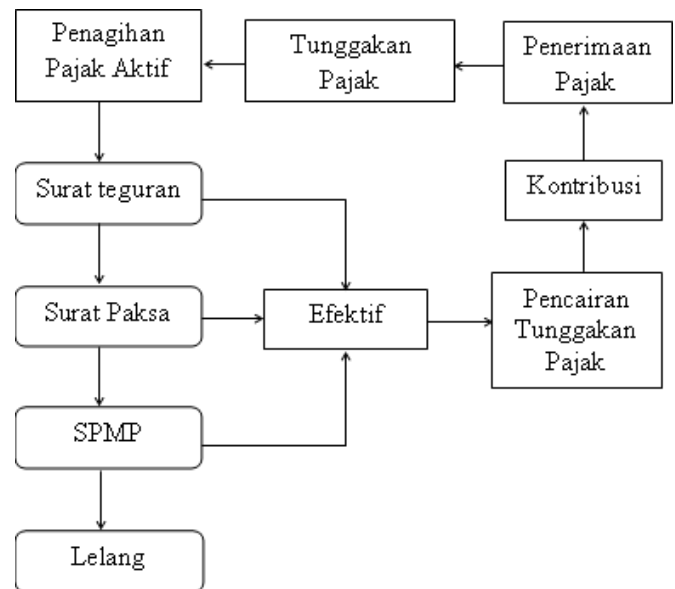
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam menghitung kontribusi penagihan pajak aktif. Dengan menggunakan IKU maka kontribusi penagihan pajak aktif di KPP Pratama Malang Utara dapat diketahui. Adapun perhitungan kontribusi berdasarkan IKU, adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak Total}} \times 100\%$$

Pengukuran kontribusi dapat dilakukan dengan indikator sebagai berikut:

Lebih dari 50% : Sangat Baik
40 % - 50 % : Baik
30 % - 40 % : Sedang
20 % - 30 % : Cukup
10 % - 30 % : Kurang
Kurang dari 10 % : Sangat Kurang.
(Halim, 2004:163)

Berdasarkan indikator pengukuran kontribusi tersebut maka semakin baik kriteria kontribusi pencairan tunggakan pajak, semakin besar kontribusi pencairan pajak terhadap penerimaan total pajak.



Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

Sumber : Data diolah

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Soehartono (2008:35) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan gambaran suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Sedangkan Sukmadinata (2006:72) menyatakan penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang suatu fenomena, dimana fenomena tersebut dapat berupa karakteristik, bentuk, aktivitas suatu fenomena.

Adapun fokus penelitian ini adalah :

1. Penagihan Pajak Aktif dengan menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada tahun 2011-2013.
2. Target dan realisasi pencairan Tunggakan Pajak melalui penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP.
3. Proses Penagihan Aktif yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara.
4. Tunggakan Pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.

Meskipun dalam penagihan pajak aktif terdapat penagihan dengan lelang, tetapi dalam penelitian ini hanya berfokus pada penagihan dengan surat teguran, surat paksa, dan SPMP. Dikarenakan bahwa penagihan aktif pada lokasi penelitian seringkali hanya sampai pada tahapan

penagihan dengan SPMP, sehingga tidak memenuhi data yang dibutuhkan.

Adapun dalam mencapai hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat teguran, surat paksa dan SPMP peneliti menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. Efektivitas penagihan pajak aktif tahun 2011-2013

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pencairan\ tunggakan\ Pajak}{Target\ Pencairan\ Tunggakan\ Pajak} \times 100\%$$

2. Kontribusi penagihan pajak aktif tahun 2011-2013 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Malang Utara

$$Kontribusi = \frac{pencairan\ tunggakan\ pajak}{penerimaan\ pajak\ total} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penagihan Pajak Aktif di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2011-2013

a. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran

Perhitungan efektivitas surat teguran berdasarkan perbandingan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran mempunyai rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pencairan\ tunggakan\ Pajak}{Target\ Pencairan\ Tunggakan\ Pajak} \times 100\%$$

Tabel 2. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2011	1.887.568.420	596.112.613	31,58%	Tidak Efektif
2012	901.942.443	596.436.795	66,13%	Kurang Efektif
2013	9.782.084.117	119.449.414	1,22%	Tidak Efektif

Sumber :Data diolah

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 melalui surat teguran berfluktuasi. Tingkat efektivitas penagihan pajak melalui surat teguran terbesar diperoleh pada tahun 2012 yaitu yaitu 66,13% atau pada kriteria kurang efektif. Pada tahun 2013 persentase efektivitas surat teguran menurun dan mencapai persentase terendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 1,22% atau pada kriteria tidak efektif. Hasil perhitungan efektivitas penagihan aktif melalui surat teguran pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 belum bisa

dinyatakan efektif karena persentase minimal efektivitas dinyatakan cukup efektif adalah 80%-90%.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Malang Utara terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir, realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat teguran di KPP Pratama Malang Utara tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Alamat dari Penanggung Pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga Surat Teguran kembali ke KPP Pratama Malang Utara.
- 2) Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.
- 3) Penanggung Pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
- 4) Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Kantor perpajakan setelah adanya kasus korupsi pegawai pajak tahun 2010, yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak, sehingga tunggakan pajak sulit ditagih.

Pada tahun 2013 KPP Pratama Malang Utara mencapai tingkat efektivitas terendah yaitu 1,22%, hal ini dikarenakan penetapan target yang sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya, penetapan target yang besar tersebut disebabkan beberapa faktor berikut ini :

- 1) Pada tahun 2012 terjadi perubahan sistem informasi di KPP Pratama Malang Utara, sehingga banyak terjadi kesalahan migrasi data untuk tahun 2013. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Jolen Tuwwankotta sebagai pegawai seksi penagihan pajak, bahwa : “Pada tahun 2012 sistem administrasi perpajakan dirubah dari SIPMOD (Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi) dengan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak), perubahan sistem administrasi ini mempunyai masalah seperti kesalahan migrasi data, yang menyebabkan tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya muncul di tahun 2013, dan membuat penetapan target pencairan surat teguran sangat besar”.
- 2) Pada tahun 2013 jumlah jurusita pajak di KPP Pratama Malang Utara sebanyak 2 (dua) orang, lebih sedikit dibandingkan tahun 2011 dan 2012 sebanyak 3 (tiga) orang jurusita pajak. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan kinerja dari seksi penagihan untuk menagih pajak, sehingga besarnya target yang telah ditetapkan tidak diimbangi dengan jumlah jurusita pajak.

b. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa

Perhitungan efektivitas surat paksa berdasarkan perbandingan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa mempunyai rumus sebagai berikut :,

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pencairan tunggakan Pajak}}{\text{Target Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 3 Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2011	505.818.186	468.448.892	92,61%	Efektif
2012	1.052.927.762	642.845.724	61,05%	Kurang Efektif
2013	1.128.936.317	342.362.531	30,33%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 3, diketahui hasil Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat paksa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 cenderung menurun. Persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa terbesar dicapai pada tahun 2011 yaitu 92,61% atau pada kriteria efektif. Pada tahun 2013 persentase efektivitas penagihan melalui surat paksa mencapai persentase terendah dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 30,33% atau pada kriteria tidak efektif. Menyadari pada tahun 2011 persentase efektivitas penagihan pajak melalui surat paksa sudah mencapai kriteria efektif, sedangkan tahun-tahun berikutnya selalu mengalami penurunan, menunjukkan bahwa perlu adanya usaha perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak aktif melalui surat paksa, baik dari sisi kinerja KPP Pratama Malang Utara maupun dari Wajib Pajak.

Berdasarkan data pada KPP Pratama Malang Utara bahwa selama tiga tahun terakhir, realisasi pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa di KPP Pratama Malang Utara selalu mengalami penurunan, sedangkan tingkat efektivitas yang tertinggi terjadi pada tahun 2011. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Penanggung Pajak bersikap konservatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya.
- 2) Penanggung Pajak tidak mengakui memiliki utang pajak.
- 3) Alamat dari Penanggung Pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga Surat Paksa tidak dapat disampaikan ke Penanggung Pajak.

Selama tiga tahun terakhir, pada tahun 2013 tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan

surat paksa mempunyai tingkat efektivitas terkecil yaitu 30,33%. Hal ini disebabkan Jumlah jurusita pajak hanya 2 (dua) orang, lebih sedikit dibanding dua tahun sebelumnya yaitu 3 (tiga) orang, hal ini diungkapkan oleh Ibu Jolen Tuwankotta sebagai pegawai seksi perpajakan, bahwa : “pada tahun 2013 terdapat pergantian dan mutasi jurusita pajak, sehingga dari 3 jurusita pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 2 jurusita di tahun 2013. Hal ini menyebabkan turunnya kinerja penagihan pajak pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan sulitnya mencapai target yang telah ditetapkan”.

c. Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Perhitungan efektivitas surat SPMP berdasarkan perbandingan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak melalui SPMP mempunyai rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pencairan tunggakan Pajak}}{\text{Target Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 4. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif melalui SPMP Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas	Kriteria
2011	40.158.080	332.452.180	827,86%	Sangat Efektif
2012	663.212.215	402.874.516	60,74%	Kurang Efektif
2013	96.832.782	92.106.884	95,12%	Efektif

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa hasil Perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan SPMP dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 berfluktuasi. Persentase efektivitas penagihan pajak melalui SPMP tertinggi diperoleh pada tahun 2011 yaitu 827,86% atau pada kriteria sangat efektif. Pada tahun 2012 persentase efektivitas penagihan melalui surat teguran mempunyai persentase terkecil yaitu 60,74% atau pada kriteria kurang efektif.

Pada tindakan penagihan pajak melalui SPMP ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas penagihan pajak melalui SPMP, yaitu Penanggung Pajak tidak bertindak kooperatif dengan jurusita pajak, hingga menolak penyitaan atas asetnya dengan segala cara, termasuk dengan kekerasan sehingga untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, pihak KPP Malang Utara seringkali membatalkan tindakan penyitaan.

Apabila melihat tingkat efektivitas pada tahun 2011, maka pencapaian target pada tahun 2011 yang realisasinya sangat jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan presentase efektivitas yaitu 827,86% dengan kriteria sangat efektif, pencapaian yang sangat tinggi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- 1) Diterbitkannya SPMP pada pertengahan tahun 2011 untuk tunggakan tahun sebelumnya yang belum tertagih.
- 2) Adanya tunggakan yang timbul pada pertengahan tahun 2011 dan langsung diterbitkannya SPMP untuk pencairan tunggakan tersebut. Tentunya terbitnya SPMP ini setelah melewati tahapan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Malang Utara

a. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran

Kontribusi penagihan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara dihitung dengan membandingkan realisasi pencairan tunggakan melalui surat teguran dan jumlah penerimaan pajak total, atau pada rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Tabel 5. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Teguran Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Penerimaan total (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	596.112.613	230.319.241.655	0,26	Sangat Kurang
2012	596.436.795	264.604.037.356	0,23	Sangat Kurang
2013	119.449.414	247.353.910.080	0,05	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran di KPP Malang Utara tahun 2011-2013 cenderung menurun. Persentase kontribusi terbesar dicapai pada tahun 2011 yaitu 0,26% atau pada kriteria sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penagihan melalui surat teguran mempunyai persentase terendah yaitu 0,05% atau pada kriteria sangat kurang. Kontribusi penagihan pajak melalui surat teguran terhadap penerimaan pajak dapat dinilai sangat kurang karena seluruh hasil perhitungan tahun 2011-2013 berada pada tingkat persentase 0,00%-10% atau pada kriteria sangat kurang. Menyadari

bahwa masih banyak tunggakan yang belum mampu dicairkan dengan surat teguran, maka perlu adanya evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran di KPP Pratama Malang Utara.

b. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa

Kontribusi penagihan pajak melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara dihitung dengan membandingkan realisasi pencairan tunggakan melalui surat paksa dan jumlah penerimaan pajak total, atau pada rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Tabel 6. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Paksa Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Penerimaan total (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	468.448.892	230.319.241.655	0,18	Sangat Kurang
2012	642.845.724	264.604.037.356	0,24	Sangat Kurang
2013	342.362.531	247.353.910.080	0,14	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat paksa di KPP Malang Utara tahun 2011-2013 berfluktuasi. Persentase kontribusi terbesar dicapai pada tahun 2012 yaitu 0,24% atau pada kriteria kontribusi yaitu sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penagihan melalui surat paksa mempunyai persentase terkecil yaitu 0,14% atau pada kriteria sangat kurang. Kontribusi penagihan melalui surat paksa terhadap penerimaan pajak dapat dinilai sangat kurang karena seluruh hasil perhitungan tahun 2011-2013 berada pada tingkat persentase 0,00%-10% atau dengan kriteria sangat kurang. Menyadari bahwa kontribusi surat paksa masih sangat kurang, pihak KPP Pratama Malang Utara perlu mengadakan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan kinerja di bidang penagihan serta melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kesadaran penanggung pajak sehingga dapat memperbesar jumlah pencairan tunggakan pajak melalui surat paksa dan memaksimalkan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

c. Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Kontribusi penagihan pajak melalui SPMP terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Malang Utara dihitung dengan membandingkan realisasi pencairan tunggakan melalui SPMP dan jumlah penerimaan pajak total, ataupun pada rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Tabel 7 Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif melalui SPMP Tahun 2011-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Penerimaan total (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	332.452.180	230.319.241.655	0,14	Sangat Kurang
2012	402.874.516	264.604.037.356	0,15	Sangat Kurang
2013	92.106.884	247.353.910.080	0,04	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa persentase kontribusi penagihan pajak aktif melalui SPMP di KPP Malang Utara tahun 2011-2013 berfluktuasi. Persentase kontribusi terbesar dicapai pada tahun 2012 yaitu 0,15% atau pada kriteria kontribusi sangat kurang. Pada tahun 2013 kontribusi penagihan melalui SPMP mempunyai persentase terkecil yaitu 0,04% atau dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi penagihan pajak melalui SPMP terhadap penerimaan pajak dinyatakan sangat kurang karena seluruh hasil perhitungan tahun 2011-2013 berada pada tingkat persentase 0,00%-10% atau dengan kriteria sangat kurang. Menyadari bahwa banyak terdapat tunggakan yang belum mampu dicairkan dengan SPMP, maka perlu adanya evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penagihan sehingga mampu meningkatkan kontribusi penagihan pajak aktif melalui SPMP di KPP Pratama Malang Utara.

Hasil Perhitungan Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif di KPP Pratama Malang Utara 2011-2013

a. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif

Hasil Perhitungan keseluruhan efektivitas penagihan pajak aktif yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan SPMP disajikan pada tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Aktif

Jenis Surat	2011	Kriteria	2012	Kriteria	2013	Kriteria
Surat Teguran	31,58%	Tidak Efektif	66,13%	Kurang Efektif	1,22%	Tidak Efektif
Surat Paksa	92,61%	Efektif	61,05%	Kurang Efektif	30,33%	Tidak Efektif
SPMP	827,86%	Sangat Efektif	60,74%	Kurang Efektif	95,12%	Efektif

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa efektivitas penagihan pajak aktif di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013 yang meliputi penagihan dengan surat teguran, surat paksa dan SPMP cenderung menurun. Hal ini terbukti pada tahun 2011 meskipun penagihan aktif dengan surat teguran tidak efektif, akan tetapi penagihan dengan surat paksa sudah efektif dan penagihan dengan SPMP sangat efektif. Pada tahun 2012 penagihan pajak aktif dapat dinyatakan kurang efektif karena baik penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa dan SPMP tergolong kurang efektif. Pada tahun 2013 penagihan pajak tidak efektif, meskipun penagihan pajak dengan SPMP sudah efektif, akan tetapi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif.

Menyadari bahwa efektivitas penagihan pajak aktif di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013 cenderung menurun, maka perlu adanya perbaikan kinerja pada KPP Pratama Malang Utara khususnya pada bidang penagihan, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Adapun penurunan efektivitas penagihan pajak aktif disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- 1) Alamat dari Penanggung Pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga proses penagihan aktif tidak dapat dilakukan.
- 2) Jumlah jurusita pajak yang tidak sebanding dengan jumlah penanggung pajak.
- 3) Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.
- 4) Penanggung Pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
- 5) Penanggung Pajak bersikap konservatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya.

b. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif

Hasil Perhitungan keseluruhan kontribusi penagihan pajak aktif yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan SPMP disajikan pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif

Jenis Surat	2011	Kriteria	2012	Kriteria	2013	Kriteria
Surat Teguran	0,26 %	Sangat Kurang	0,23 %	Sangat Kurang	0,05 %	Sangat Kurang
Surat Paksa	0,18 %	Sangat Kurang	0,24 %	Sangat Kurang	0,14 %	Sangat Kurang
SPMP	0,14 %	Sangat Kurang	0,15 %	Sangat Kurang	0,04 %	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013 sangat kurang. Hal ini terlihat bahwa penagihan pajak aktif baik melalui surat teguran, surat paksa, maupun SPMP mempunyai kriteria sangat kurang. Menyadari bahwa kontribusi penagihan pajak aktif di KPP Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013 sangat kurang, maka perlu adanya perbaikan kinerja khususnya pada bidang penagihan dalam rangka mengoptimalkan kontribusi penagihan pajak pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran di KPP Pratama Malang Utara tahun 2011-2013 dinyatakan tidak efektif. Terbukti dari persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2011 yaitu 31,58% atau tidak efektif, tahun 2012 yaitu 66,13% atau kurang efektif, dan tahun 2013 yaitu 1,22% atau tidak efektif.
2. Penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa di KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 dinyatakan kurang efektif. Terbukti dari pencapaian persentase efektivitas tahun 2011 yaitu 92,61% atau efektif, tahun 2012 yaitu 61,05% atau kurang efektif, dan tahun 2013 yaitu 30,33% atau tidak efektif. Disamping itu, tingkat efektivitas selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang negatif karena selalu mengalami penurunan.
3. Penagihan pajak aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) di KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2011-2013 dinyatakan sudah efektif. Terbukti dari persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2011 yaitu 827,86%, atau sangat efektif, tahun 2012 yaitu 60,74% atau kurang efektif, dan tahun 2013 yaitu 95,12% atau efektif.

4. Tingkat kontribusi penagihan pajak aktif melalui surat teguran, surat paksa maupun surat perintah melaksanakan penyitaan kurang dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Malang Utara. Terbukti bahwa tingkat kontribusi ketiga surat tersebut berada dibawah 10% atau sangat kurang. Rata-rata kontribusi untuk penagihan aktif melalui surat teguran yaitu 0,18%, untuk surat paksa yaitu 0,19%, dan untuk SPMP yaitu 0,11%. Sehingga perlu adanya perbaikan kinerja fiskus dan meningkatkan kesadaran dari penanggung pajak agar dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Utara.

Saran

1. KPP Pratama Malang Utara perlu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang keutamaan membayar pajak. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk membuat semenarik mungkin.
2. KPP Pratama Malang Utara Perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara perlu mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, misalnya dengan pemerintah daerah untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan, atau dengan kepolisian untuk melindungi jurusita pajak dalam proses penyitaan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, misalnya alat dokumentasi sebagai bukti bahwa penanggung pajak mempunyai aset yang dapat disita.

DAFTAR PUSTAKA

- Guritno, T. 1996. *Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Indeks IKAPI.

- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Sukmadinata, N.S. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya
- Taliziduhu, Ndraha. 2005. *Kybernologi : Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ulum, Md Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang : Umm Press